

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Hamid. *Teori Negara Hukum Modern*. Pustaka Setia. Bandung. 2016.
- Abintoro Prakoso. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Justisia. Surabaya. 2013.
- Achmad Sulchan. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Demak*. Semarang. 2018.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- Aditya Weriansyah (et.al). *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*. Indonesia Judicial Research Society. Jakarta.
- Admaja Priyatno. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. CV Utomo. Bandung. 2004.
- Adrianus Meliala. *Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif*. Alumni. Bandung. 2010.
- Albert Aries. *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru*. Rajawali Pers. Depok. 2024.
- Alf Ross. *On Guilt. Responsibility. and Punishment*. Stevens & Sons. London. 1975.
- Andi Matalata. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pusat Sinar Harapan. Jakarta.

- Andreas N. Marbun. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. MAPPI FH UI. Depok. 2020.
- Apong Herlina (et.al.). *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- AR Suhariyono. *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*. Papas Sinar Sinanti. Jakarta. 2007.
- Aryaputra M I. *Permaafan Hakim dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Indonesia. Jakarta. 2013.
- Asep N. Mulyana. *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*. PT Grassindo. Jakarta. 2009.
- Aulia Ali Reza. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Institute of Criminal Justice Reform. Jakarta. 2016.
- B. N. Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Undip. Semarang. 1994.
- Bambang Poernomo. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1984.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.

- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2014.
- Chairul Huda. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta. 2006.
- Dominik Brodowski (et.al.). *Regulating Corporate Criminal Liability*. Springer. Switzerland. 2014.
- Dwidja Priyanto. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana. Jakarta. 2010.
- E Fernando M. Manulang. *Menanggapi Hukum Berkeadilan*. Kompas Media Nusantara. Jakarta. 2007.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Edi Yunara. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Studi Kasus*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.
- Eriyantouw Wahid. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Universitas Trisaksi. Jakarta. 2009.
- Evi Hartati. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. PT Nusantara Persada Utama. Tangerang. 2017.
- G. Widiarnata dan Aloysius Wisnubroto. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.

- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Setara Press. Malang. 2015.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Press. Jakarta. 2015.
- Hanafi. “Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. *Thesis*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta. 1997.
- Hanafi. *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*. Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 1997.
- Harkristuti Harkrisnowo. *Redefinisi Pidana dan Pemidanaan Korporasi dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2019.
- Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. LPPM UHN Press. Medan. 2020.
- Howard Zehr. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press. Waterloo. 1990.
- Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Cetakan Kelima. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2015.
- Jan Remmelink. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2003.

John Brithwaite. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press. Oxford. 2002.

Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Cetakan Pertama. Kepel Press. Yogyakarta. 2019.

Joko Sriwidodo. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Pertama. Penerbit Kepel Press. Yogyakarta. 2022.

Kristian. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoretis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*. PT Refika Aditama. Bandung. 2016.

Loebby Loqman. *Delik Politik di Indonesia*. IND-HILL-CO. Jakarta. 1993.

M. Hamdan. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Mandar Maju. Bandung. 2000.

Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.

Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Rajawali Press. Jakarta. 2013.

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

Mahrus Ali. *Kejahatan Korporasi. Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*. Arti Bumi Intaran. Yogyakarta. 2008.

Marcus Fletcher, *A-Level Principle of English Law*, 1st Edition, London: HLT Publication, 1990..

Mardjono Reksodiputro. *Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*. Cetakan Pertama. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta 1994.

Mardjono Reksodiputro. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 1989.

Miriam Liebman. *Restorative justice: How It Works*. Jessica Kingsley Publishers. London. 2007.

Moeljatno. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta. 2005.

Muhammad Syukri Albani Nasution. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Cetakan Kedua. Kencana. Jakarta. 2017.

Muhammad Mustofa. *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2010.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998.

Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability)*. Edisi 1. Alumni. Bandung. 2023.

Muladi dan Dwidja Priyanto. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana. Jakarta. 2010.

- Muladi dan Priyatno Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana. Jakarta. 2010.
- Muladi. *Identifikasi Teoritik dan Konseptual Pertanggungjawaban Pidana Korporasi serta Kebijakan Kriminal untuk Mengatasinya*. Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi serta Kebijakan Kriminal. Semarang. 2015.
- Muladi. *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi. Universitas Diponegoro. Semarang. 1999.
- Muladi. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi (Criminal Responsibility) dalam Kerangka the Legal Environment of Business*. ELSAM. Jakarta. 2013. hlm. 20.
- Musa Darwin Pane. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Logos Publishing. Bandung. 2017.
- Nikmah Rosidah. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Pustaka Magister. Semarang. 2014.
- Ninie Suparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002.
- R. Soesilo. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentar Setiap Pasal*. Politea. Bogor. 1996.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982.

- Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986.
- Rofinus Hotmaulana Hutaauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2018.
- Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Prenadamedia Group. Semarang. 2003.
- Roni Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. CV Mandar Maju. Bandung. 2016.
- Rudi M. Rizky (ed). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Perum Percetakan Republik Indonesia. Jakarta. 2008.
- Rufinus Hotmaulana Hutahuruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Cetakan ke-2. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
- Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini. *Hukum Pidana dalam Bagan*. FH Untan Press. Pontianak. 2015.
- Satjipto Rahadrjo. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung. 1991.

- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta. 1993.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta. 1993.
- Setiyono H. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Averroes Press. Malang. 2002.
- Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- Solly Lubis M. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju. Bandung. 1994.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat. Teori. dan Praktik)*. Rajawali Pers. Depok. 2020.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010.
- Tony Marshall. *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistic Directorate. London. 1999.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. 2011.

Yusuf Shofie. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011.

JURNAL

Achmad Ratomi. “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi dan Industri)”. 10:1 *Al’Adi* (Januari 2018).

Aghia Khumsesi Suud. “Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Kasus Korupsi”. 52:2 *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* (Juli 2023). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>.

Agung Susanto. “Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP dan Sistem dari Negara Belanda”. 7:1 *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* (2022). <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12734>.

Ananthi Bharadwaj. “Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007”. 21:1 *National Law School of India Review* (2009).

Anca Julia Pop. “Criminal Liability of Corporations-Comparative Jurisprudence”. *Michigan State University College of Law: Digital Commons at Michigan State University College of Law* (2006). <http://digitalcommons.law.msu.edu/king/81>

Andika Temanta Purba dan T. Keizerina Devi Azwar. “Perbandingan Kasus Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia dan Amerika Serikat”. 6:2 *Res Nulius Law Journal* (Juli 2024). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v6i2.11892>.

Bambang Ali Kusumo. “Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Hukum Pidana di Indonesia”. 7:2 *Wacana Hukum* (2008). <https://dx.doi.org/10.33061/1.jwh.2008.7.2.333>.

Berend F. Keulen dan Erik Gritter. “CorporateCriminal Liability in theNetherlands”. 9 *IUSGENT: Ius Gentium: Comparative Perspectiveon Law and Justice* (2010). https://doi.org/10.1007/978-94-007-0674-3_6.

Budi Suhariyanto. “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi”. 9:1 *Negara Hukum* (2018). <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v9i1.855>.

Carrie Menkel-Meadow, “*Restorative Justice: What Is It and Does It Work*”, *Annual Review of Law and Social Science*, Vol. 03, No. 01, 2007, hlm. 161-187, <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.2.081805.110005>.

Chris Agave Valentin Berutu (*et.al.*). “Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. 1:5 *Locus: Journal of Academic Literature Review* (2022). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.87>.

Darrell Fox. “Social Welfare and *Restorative Justice*”. 17 *Kriminologija I SocijalnaIntegracija* (2009). <https://hrcak.srce.hr/40733>.

Duwi Aryadi. “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai yang Berwawasan Pancasila”. 9:2 *Al-Daulah* (Desember 2020).

Eliksander Siagian (*et.al.*). “Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseoran Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya”. 2:7 *Locus Journal of Academic Literature Review* (Juli 2023).
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.209>.

Emilia Susanti. “Studi Komparatif Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Denda dalam KUHP dan RKUHP”. 7:2 *Jurnal Peonale* (2019).
<http://repository.lppm.unila.ac.id/13220/>.

Fifink Praiseda Alviolita. “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld”. 3:1 *Refleksi Hukum* (2018). <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p1-16>.

Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief. “Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia”. 7:2 *Law Reform* (2012). <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>.

Hariman Satria, “Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”, *INTEGRITAS*, Vol. 04, No. 02, Desember 2018, hlm. 25-52,
<https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.255>.

Hennry Saida Flora “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di

Indonesia”. 3:2 *UBELAJ: University of Bengkulu Law Journal* (2018).
<https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

Henny Yunita Fitriani dan Dona Budi Kharisma. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT Rayon Utama Makmur Kabupaten Sukoharjo)”. 8:2 *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* (Juli-Desember 2020). <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49757>.

Herlyanty Yuliana Anggraeny Bawole. “Implementasi Pendekatan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Menurut Sistem Hukum Pidana di Indonesia”. 3:3 *Jurnal Lex Crimen* (2014).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/5303>.

Hesti Widyaningrum. “Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi”. 11:2 *Volksgeist* (Desember 2018).

Indung Wijayanto. “Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia”. 10:2 *Pandecta* (Desember 2015).
<http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v10i2>.

Jeanny Jessica, “Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Korporasi: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 64/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Bgl.”, 51:4, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hlm. 927-951, (Oktober 2021), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3295>.

Jimmy Tawalujan. “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan”. 1:3 *Jurnal Lex Crimen* (Juli-September 2012).

Kuat Puji Prayitno. “RestorativeJustice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Huku. in Concreto). 12:3 *Jurnal Dinamika Hukum* (September 2012).

Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari. “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory*”. 29:2 JH IUS Quia Iustum (Mei 2022).

Lakso Anindito. “Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. Inggris. dan Prancis”. 3:1 *Integritas: Jurnal Anti Korupsi* (Maret 2017).
<https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.138>.

Listawati. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”. 37:2 *Justitia EtPax* (Desember 2021).

Mario Setyo Nugroho. “Pemidanaan Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Konsep Pertanggungjawabannya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 787K/Pid.Sus/2014)”. 5:2 *Jurnal Verstek* (2017).
<https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33468>.

Misbahul Huda. “Politik Hukum Tindak Pidana Korporasidi Indonesia”. 1:2 *IBLAM Law Review* (2021).

Mochammad Ridha dan Bisma Putra Pratama. “Penerapan RestorativeJustice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912”. 6:2 *UNES Law Review* (Desember 2023).
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Muchamad Chasani. "Corporate Criminal Liability in Indonesia on the Perspective of Comparison". 2:2 *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* (2017).
<http://dx.doi.org/10.15294/ijcls.v2i2.12322>.

Muh. Jusrin dan Wahyu Prianto. "Upaya Mewujudkan Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari (Studi Perkara Nomor: 257/Pid.B/2023/PN.Kdi)". 2:1 *JISDIK: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* (2024).
<https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/66>.

Muhammad Helmi. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam". XIV:2 *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* (Desember 2015).
<https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.342>.

Muhammad Iftar Arya Putra. "Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan Bagi Korporasi dalam KUHP Nasional". 52:2 *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* (2023).

Muhammad Iftar Aryaputra dan Ani Triwati. "Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan Bagi Korporasi Dalam KUHP Nasional". 52:2 *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* (Juli 2023). <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.208-216>.

Muhammad Taufik. "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan". 19:1 *Mukadimah: Jurnal Studi Islam* (2013).

Mukhlis R dan Chindy Maria Rohani Sipahutar. "Eksistensi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru”. 10:1 *Jurnal Hukum Das Sollen* (2024). <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i1.3325>.

Ni Putu Ayu Leni Cahyarani (*et.al.*). “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia”. 4:1 *Kertha Wicara* (2015).

Nurul Listiyani dan Rakhmat Nopliardy. “Kajian Terhadap UU Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Atas Dihapusnya Prinsip Strict Liability”. 8:2 *Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora* (2022).

Pujiyoni (*et.al.*). “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Konsep *Restorative Justice*”. 2:2 *Pembaharuan Hukum Pidana* (September 2019). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25037>.

Rayhan Wardhana Hascarya Dwiyantama. “Studi Perbandingan Hukum Perwujudan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara Inggris dan Indonesia”. 4:1 *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* (Maret 2023). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i1.12359>.

Reni Aryani dan Hudi Yusuf, “Praktik Keadilan Restoratif dan Efektivitasnya Dalam Mengurangi Residivisme” *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 01, No. 06, Agustus 2024, hlm. 1848-1855, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/763>.

Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability”. 1:2 *Jurnal Yuridis* (Desember 2014). <https://doi.org/10.35586/.v1i2.148>.

- Rodliyah (*et.al.*). “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. 5:1 *Jurnal Kompilasi Hukum* (Juni 2020). <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.
- Saksia Eryarifa. “Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. 1:2 *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* (Juni 2022).
- Sara Sun Beale. “A ResponsetotheCriticsofCorporateCriminal Liability”. 46 *American Criminal Law Review* (2009).
- Sekar Ayu Dita dan Atik Winanti. “Analisis Asas *Vicarious Liability* dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank”. 26:2 *Jurnal USM Law Review* (2023). <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037>.
- Shira Thani. “Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. 51 *Jurnal Warta Dharmawangsa* (2017). <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i51.240>.
- Subaidah Ratna Juita. “Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana pada Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. 16:2 *Jurnal Nasional* (Desember 2014). <https://repository.usm.ac.id/detail-jurnalnasional-391.html>.
- Sunarto. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”. 15:1 (2018). <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109>.

Susan dan Akhmad Zulkifli. “Pengaturan tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. 10:2 *Wasaka Hukum* (2022).

Timbo Manganarap Sirait. “Perkembangan Ilmu Hukum Pidana Korporasi Dihubungkan dengan Pendidikan Hukum Berkelanjutan bagi Advokat”. 3:2 *Veritaset Justitia* (2017). <https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2684>.

Wasistha Budiarja Darmawan (*et.al.*). “Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan yang Dilakukan oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 1405K/Pid.Sus/2013)”. 4:2 *Recidive* (2015).

Yedidia Z. Stern. “Corporate Criminal Personal Liability- Who is The Corporation?”. 13:1 *Journal of Corporation Law* (1987).

Yohanes Surhadin. “Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum”. 21:2 *Jurnal Mimbar Hukum* (2009).

Zico Junius Fernando. “Pentingnya *Restorative Justice* Dalam Konsep Ius Constituendum”. 5:2 *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Hukum* (2020).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang.

Undang-undang dengan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan. Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE).

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DISERTASI, TESIS, ATAU SKRIPSI

AR Suhariyono. “Pembaruan Pidana Denda di Indonesia”. *Disertasi*. Program Doktor Universitas Indonesia, Jakarta. 2009.

Erlangga Wisnu. “Analisis Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam KUHP Baru Menurut Teori Kebijakan Hukum Pidana”. *Tesis*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Jakarta. 2023.

Nani Mulyati. “Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Disertasi*. Program Doktor Universitas Indonesia. Jakarta. 2018.

Nur Khairul Hasanah. “Perbandingan Pengaturan Human Trafficking Ditinjau Dari KUHP Dan UU No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.

Rheka Leony Fadmi. “Alat Bukti Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt)”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat. Bukittinggi. 2022.

Suhariyono AR. “Pembaruan Pidana Denda di Indonesia”. *Disertasi*. Program Doktor Universitas Indonesia. Jakarta. 2009.

INTERNET

Ady Thea DA. “Dua Pertimbangan MA Ubah Hukuman Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pertimbangan-ma-ubah-hukuman-ferdy-sambo-jadi-seumur-hidup-lt64ec7f0c6bd8b/> [diakses tanggal 26/11/2023].

Ahmad Sofian. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Delik HAM”. <https://business-law.binus.ac.id/2015/07/18/pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-delik-ham/> [diakses tanggal 19/08/2024].

Andreas Nathaniel Marbun dan Revi Laracaka. “Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi

dalam Perkara Tipikor”. 5:1 *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*. hlm. 127-167 (2019). <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.384>.

Casemine. “Tesco Supermarkets Ltd V. Nattrass”.
<https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff8ca60d03e7f57ecd797>
[diakses tanggal 1/10/2024].

CNBC Indonesia, “Korupsi PT Duta Palma Korporasi, Kejagung Sita Uang Tunai Rp 372 M”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241003154137-4-576743/korupsi-pt-duta-palma-korporasi-kejagung-sita-uang-tunai-rp372-m>, [diakses tanggal 16/10/2024].

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.
“Menkumham: Perubahan Paradigma Pemidanaan Indonesia Suatu Keniscayaan”. <http://www.ditjenpas.go.id/menkumham-perubahan-paradigma-pemidanaan-indonesia-suatu-keniscayaan> [diakses tanggal 10/10/2024].

Hukumonline. “Begini Arah Politik Hukum KUHP Nasional”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-arah-politik-hukum-kuhp-nasional-lt66da805244fb9/?page=2> [diakses tanggal 10/10/2024].

Hukumonline. “Berbagai Masalah Pidana Korporasi di RKUHP Menurut Para Ahli”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/berbagai-masalah-pidana-korporasi-di-rkuhp-menurut-para-ahli-lt60b23406931db/> [diakses tanggal 10/10/2024].

Hukumonline. “Korupsi Korporasi dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidananya”.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-korporasi-lt61dcc1ac7d662/> [diakses tanggal 2/10/2024].

Hukumonline. “Legal Due Dilligence: Arti. Jenis. Tujuan. dan Tahapan”.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-legal-due-diligence-lt61827f645aa0c/> [diakses tanggal 30/09/2024].

Hukumonline. “Menilik Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru”.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuhp-baru-lt65fe9864a6846/> [diakses tanggal 1/10/2024].

Hukumonline. “Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Wetboek Van Strafrecht

dan KUHP”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-korporasi-berdasarkan-wetboek-van-strafrecht-dan-kuhp-lt63ff61b18e1af/> [diakses tanggal 1/10/2024].

Institute Criminal Justice Reform. “Mendorong Penegakan Pertanggungjawaban

Korporasi dalam Perkara Pidana: Perma No 13 Tahun 2016 dan Tantangannya”. [https://icjr.or.id/mendorong-penegakan-](https://icjr.or.id/mendorong-penegakan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-perkara-pidana-perma-no-13-tahun-2016-dan-tantangannya/)

[pertanggungjawaban-korporasi-dalam-perkara-pidana-perma-no-13-tahun-2016-dan-tantangannya/](https://icjr.or.id/mendorong-penegakan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-perkara-pidana-perma-no-13-tahun-2016-dan-tantangannya/) [diakses tanggal 9/10/2024].

KawanHukum.id. “Menyoal Tindak Pidana Korporasi Setelah Diterbitkannya

KUHP Baru”. <https://kawanhukum.id/menyoal-tindak-pidana-korporasi-setelah-diterbitkannya-kuhp-baru/2/> [diakses tanggal 1/10/2024].

Kompas.com, “Perjalanan Kasus PT NKE, Korporasi Pertama yang Divonis Korupsi”,

<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/04/06115311/perjalanan-kasus-pt-nke-korporasi-pertama-yang-divonis-korupsi?page=all>, [diakses tanggal 16/10/2024].

LBH Pengayoman. “KUHP Series Episode 2: Menggali Perubahan Mendasar Berkaitan dengan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru”. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kuhp-series-episode-2-menggali-perubahan-mendasar-berkaitan-dengan-tindak-pidana-dan-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru/> [diakses tanggal 20/08/2024].

LBH Pengayoman. “KUHP Series Episode 6 [Menata Landasan Hukum yang Kokoh untuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP Baru]”. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kuhp-series-episode-6-menata-landasan-hukum-yang-kokoh-untuk-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-kuhp-baru-agustinus-pohan-s-h-m-s/> [diakses tanggal 1 /10/2024].

Qithirul Fahmi. “Wamenkumham: UU KUHP Berorientasi pada Hukum Pidana Modern”. <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2023/04/wamenkumham-uu-kuhp-berorientasi-pada-hukum-pidana-modern/> [diakses tanggal 10/10/2024].